JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019

- **Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom**
Damian Agata Yuvens dan Rianty Hutabarat

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Faisal Luqman Hakim	1
2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001) Rai Mantili, Anita Afriana	19
3. Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia Sufiarina	41
4. Tuntutan atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat) Heri Hartanto	59
5. Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia Wetria Fauzi	75
6. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Teuku Yudi Afrizal	93
7. Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa	113
8. Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom Damian Agata Yuvens dan Rianty Hutabarat	133
9. Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian <i>Overlapping</i> Hak Cipta dan Merek) Muchtar A H Labetubun	151
10. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita	167

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN HAKIM PERDATA DALAM MENILAI KOMPETENSINYA SECARA OTONOM

Damian Agata Yuvens dan Rianty Hutabarat

agata.yuvens@gmail.com

Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maramis

rianty.hutabarat@gmail.com

JLC & Associates Law Firm

ABSTRAK

Buku II Mahkamah Agung menentukan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 132 Rv menyatakan bahwa ketidakberwenangan adalah hal yang harus dinyatakan oleh hakim secara *ex officio*. Sayangnya, kedua ketentuan ini tidak selalu diterapkan. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah kedua kewajiban ini seyogianya dilaksanakan? Dalam tulisan ini, pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan kacamata normatif pada 2 tataran, yaitu azas dan implementasi. Azas yang menjadi batu uji adalah azas hakim bersifat pasif dan azas *ius curia novit*. Sehubungan dengan azas hakim bersifat pasif, yang menjadi sorotan adalah ruang lingkup kepasifan hakim perdata dalam pemeriksaan perkara dan kemungkinan terjadinya *ultra petita*, sedangkan untuk azas *ius curia novit*, yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terlanggarannya adagium hakim tidak boleh menolak perkara. Analisis pada tataran implementasi dari kewajiban hakim dalam memeriksa kompetensinya dilakukan dengan membayangkan implementasinya dari sisi positif dan negatif. Jika kewajiban ini dilakukan, beban hakimlah yang menjadi masalah utama, namun jika tidak dilakukan, kemungkinan menjamurnya *vexatious litigation* dan ketiadaan upaya hukumlah yang terbayang. Kesimpulannya adalah, hakim perdata seyogianya melakukan penilaian terhadap kompetensinya terlebih dahulu ketika suatu permohonan diajukan kepadanya.

Kata Kunci: *kompetensi, permohonan, penilaian sendiri*

ABSTRACT

Book II of Supreme Court determines that district court is only authorized to examine and grant the petition if it is determined by laws and regulations. Further, Article 132 of Rv stipulates that incompetence shall be declared by the judge in ex officio manner. Alas, these provisions are not always implemented. This raises question. Should these obligations be implemented? In this paper, the question is answered by using normative lens in 2 levels, i.e. principle and implementation. Principles serving as testing ground are principle of judges being passive and principle of ius curia novit. In relation to principle of judges being passive, the highlight is the scope of passiveness of the judge in examining a case and possibility of ultra petita. As for principle of ius curia novit, the highlight is possibility on violation of judges shall not reject case maxim. Analysis on implementation level of judges' obligation to assess its own competence is conducted by picturing the implementation from

both positive and negative sides. Should this obligation be carried out, burden of the judges would be main problem. Meanwhile, should this obligation is not carried out, probability of vexatious litigation to be ubiquitous and absence of legal recourse would be envisioned. The conclusion is: the civil judges should have assessed its competence first when the petition is submitted.

Keywords: *competence, petition, self-assessment*

LATAR BELAKANG

Di dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 (“**Buku II MA**”), halaman 44 angka 6 dinyatakan: “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*”¹ Artinya, pengadilan negeri baru bisa memeriksa permohonan yang diajukan jika peraturan perundang-undangan menentukannya demikian. Sebaliknya, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan atribusi kewenangan kepada pengadilan negeri, pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa suatu permohonan.

Kondisi ini telah diakui dan diterapkan dalam pelbagai undang-undang. Ada 2 model pengaturan yang memberikan atribusi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa permohonan. *Pertama*, dengan menyatakan bahwa harus ada pengajuan permohonan ke pengadilan negeri untuk melakukan suatu hal tertentu. Contohnya: permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.² *Kedua*, dengan menyatakan bahwa harus ada penetapan dari pengadilan negeri—yang merupakan produk akhir dari permohonan³—untuk melakukan suatu hal tertentu. Contohnya: penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁴

Selanjutnya, Pasal 132 *Reglement op de Rechtvordering* (“**Rv**”) jelas menyatakan: “*Ingeval de rechter onbevoegd mocht zijn uithoofde van het onderwerp des geschils, is*

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dan Perdata Khusus Buku II*, Edisi 2007, n.p., Jakarta, h. 44.

² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007 (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756) Pasal 80 ayat (1).

³ Lihat, M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40. Lihat juga, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-11, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 11.

⁴ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006 (LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674) Pasal 36.

hij, ook al is de exceptie van onbevoegdheid niet voorgesteld, ambtshalve gehouden zich onbevoegd te verklaren.”⁵ yang diterjemahkan secara bebas menjadi: “*Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.*” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim secara *ex officio* wajib untuk menilai terlebih dahulu, apakah ia berwenang untuk memeriksa perkara (termasuk permohonan) yang diajukan kepadanya.

Dengan mengaitkan kewajiban dalam Buku II MA dan Pasal 132 Rv, seandainya hakim menemukan bahwa permohonan yang diajukan kepadanya tidak memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan, maka demi hukum hakim harus menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pada kenyataannya, tidak demikian yang terjadi: ada saja hakim yang kemudian tidak mengacuhkan kaidah mengenai permohonan ini.

Contoh yang diangkat guna menggambarkan keteledoran hakim dalam menjalankan kewajiban ini adalah Penetapan No. 29/Pdt.P/2017/PN Trg. Di sini, yang menjadi pemohon adalah H. Veritas Saranggi (“**Saranggi**”)⁶ dan tidak ada termohon. Yang dimohonkan adalah perubahan nama penerima pelepasan hak atas tanah⁷ dan Saranggi memang tidak pernah menguraikan perihal kewenangan pengadilan terhadap permohonan yang ia ajukan. Dasar pengajuan permohonan ini adalah: (i) pelepasan hak atas tanah yang terjadi pada tahun 2010-2011 dilakukan oleh Ruddy Sutedja (“**Sutedja**”) atas dasar kuasa dari PT. Bintang Prima Energy Pratama (“**PT BPEP**”);⁸ (ii) Sutedja adalah direktur dari PT. Bangun Karya Pratama Langgeng (“**PT BKPL**”);⁹ (iii) pelepasan dilakukan dengan menggunakan uang PT BKPL;¹⁰ (iv) ada perjanjian kerja sama antara PT BKPL dengan PT BPEP;¹¹ dan (v) penerima pelepasan hak atas tanah adalah Sutedja atas nama PT BPEP¹². Perubahan yang dikehendaki oleh Saranggi adalah agar penerima pelepasan hak atas tanah menjadi Sutedja atas nama PT BKPL.¹³

Dalam Penetapan No. 29/Pdt.P/2017/PN Trg, hakim yang memeriksa perkara—Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.—memutuskan untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang diajukan.¹⁴ Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dalam mengabulkan permohonan Saranggi hanya berkutat seputar makna dari pelepasan

⁵ *Reglement op de Rechtvordering* (S. 1847-52 jo. 1849-63) Pasal 132.

⁶ H. Veritas Saranggi, PN Tenggara, Penetapan No. 29/Pdt.P/2017/PN Trg, 28 Juli 2017, h. 1.

⁷ *Ibid.*, h. 31.

⁸ *Ibid.*, h. 26.

⁹ *Ibid.*, h. 27.

¹⁰ *Ibid.*, h. 26-27.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 28.

¹³ *Ibid.*, h. 31.

¹⁴ *Ibid.*, h. 61.

hak atas tanah.¹⁵ Tidak ada 1 pertimbangan pun mengenai mengapa nama PT BPEP harus diganti menjadi PT BKPL.

Selain kurangnya pertimbangan mengenai pokok perkara, yang menarik untuk diperhatikan adalah jenis permohonan yang diajukan, yaitu permohonan untuk mengubah nama penerima pelepasan hak atas tanah. Jenis permohonan ini tidaklah memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan. Jika saja Hakim Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. mematuhi pedoman dalam Buku II MA dan Pasal 132 Rv, seharusnya penetapannya adalah menyatakan permohonan Saranggi tidak dapat diterima. Namun tidak demikian yang terjadi.

Dari uraian di atas, muncullah sebuah pertanyaan: jika telah ada kewajiban bagi hakim untuk terlebih dahulu menentukan kompetensinya terhadap suatu perkara, lantas mengapa secara praktis kewajiban ini masih diabaikan? Apakah karena kewajiban hukum ini bertentangan dengan azas-azas dalam hukum acara perdata, khususnya azas hakim bersifat pasif dan azas *ius curia novit*? Atau apakah ada permasalahan teknis yang akan dihadapi jika kewajiban ini dilaksanakan?

PEMBAHASAN

Analisis mengenai kewajiban penilaian secara otonom mengenai kompetensi oleh hakim perdata akan dilakukan pada 2 tataran, yaitu tataran azas dan tataran praktis. Analisis pada tataran azas dilakukan guna melihat apakah ada halangan bagi hakim perdata untuk melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Buku II MA dan Pasal 132 Rv jika ditinjau dari perspektif azas-azas hukum acara perdata. Tidak semua azas akan dijadikan batu uji. Azas yang akan dijadikan batu uji adalah azas hakim bersifat pasif dan azas *ius curia novit*. Dipilihnya kedua azas ini dikarenakan adanya kesan bahwa penilaian hakim secara otonom merupakan tindakan aktif hakim yang melanggar azas hakim bersifat pasif dan penolakan hakim untuk memeriksa permohonan yang diajukan seolah melanggar adagium hakim tidak boleh menolak perkara yang merupakan turunan dari azas *ius curia novit*, sedangkan analisis pada tataran implementasi dilakukan guna melihat hambatan secara praktis yang mungkin dihadapi oleh hakim perdata seandainya mereka menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Buku II MA dan Pasal 132 Rv. Di sisi lain, analisis praktis juga dilakukan terhadap kemungkinan jika kewajiban ini tidak dilakukan guna memperlihatkan apa yang akan terjadi seandainya hakim perdata terus-menerus mengabaikan kewajiban ini.

¹⁵ *Ibid.*, h. 58-59.

Pada Bagian Pembahasan ini, analisis akan dilakukan dengan mencoba menjawab beberapa pertanyaan panduan berikut. Pada tataran azas, ada 2 pertanyaan yang akan dibahas. *Pertama*, jika hakim perdata menilai kompetensinya sendiri tanpa pernah didalilkan oleh pemohon, apakah bisa dikatakan bahwa hakim telah menyimpangi kedudukannya untuk bersifat pasif? *Kedua*, jika kemudian hakim tidak menerima permohonan yang diajukan, apakah lantas hakim telah memutus secara *ultra petita* dan melanggar kewajiban hukum dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU KK”) untuk tidak menolak perkara¹⁶? Sedangkan dalam tataran praktis, ada 2 pertanyaan juga yang akan dijawab. *Pertama*, adakah masalah secara praktis yang akan dihadapi jika kewajiban pemeriksaan kompetensi secara otonom ini dilakukan? *Kedua*, seandainya pemeriksaan kompetensi secara otonom terkait pengajuan permohonan ini tidak dilakukan, akankah ada masalah praktis yang akan dihadapi?

Penilaian Kompetensi Sendiri dan Azas Hakim Bersifat Pasif

Azas hakim bersifat pasif memiliki beberapa makna, yaitu: (i) hakim tidak bisa menginisiasi suatu perkara; (ii) hakim tidak bisa menentukan lingkup sengketa maupun luasnya pokok perkara; (iii) hakim tidak bisa menentukan kelanjutan perkara; dan (iv) hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta.¹⁷ Dalam hal hakim melakukan penilaian terhadap kompetensinya sendiri meski pemohon tidak pernah mendalilkannya, secara *prima facie* dapat dikatakan bahwa hakim telah memperluas ruang lingkup permasalahan yang dibawa ke hadapannya. Sedangkan ketika hakim kemudian mengeluarkan penetapan yang isinya tidak menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon karena pengadilan tidak memiliki kewenangan, *prima facie* penetapan menjadi melebihi dari apa yang dimohonkan (*ultra petita*). Dengan demikian, nampaknya azas hakim bersifat pasif menjadi terlanggar. Benarkah demikian?

Guna memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, sebuah ilustrasi akan diberikan. Katakanlah A hendak mengubah keseluruhan namanya menjadi B. Untuk mewujudkan hal tersebut, A harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri.¹⁸ Dengan menerapkan perwujudan dari azas hakim bersifat pasif sebagaimana disebutkan di atas, maka nampak

¹⁶ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009 (LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076) Pasal 10 ayat (1).

¹⁷ Lihat, Lilik Mulyadi, 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Cet. Ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 12-13. Lihat juga, Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-7, Penerbit Liberty, Yogyakarta, h. 12-13. Lihat juga, R. Benny Rijanto, *Modul 1: Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, Universitas Terbuka, <http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf>, h. 26-30, diakses pada 2 Juli 2018. Lihat juga, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, h. 12.

¹⁸ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 52 ayat (1).

bahwa: *pertama*, kebutuhan A untuk mengubah nama yang menyebabkan A mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Bukan hakim yang mengajukannya: hakim hanya menerima dan memeriksanya. *Kedua*, adalah A yang menentukan bahwa ia ingin mengganti keseluruhan namanya dan bahwa nama penggantinya adalah B. Hakim tidak bisa menyatakan bahwa yang hendak dilakukan A adalah mengubah sebagian dari namanya saja, dan tidak bisa pula menyatakan bahwa perubahan namanya adalah C dan bukan B. *Ketiga*, pada setiap waktu selama persidangan, A berhak untuk mencabut permohonannya. Hakim tidak berwenang untuk menghalangi pencabutan tersebut. *Keempat*, oleh karena yang dimohonkan oleh A adalah mengubah keseluruhan namanya menjadi B, maka hakim tidak berwenang untuk mengubah hanya sebagian nama dari A dan tidak pula berwenang untuk mengubah nama A menjadi C. Yang bisa dilakukan oleh hakim adalah: menerima, menolak atau tidak menerima permohonan A.

Dari ilustrasi penerapan wujud azas hakim bersifat pasif, terlihat bahwa hakim hanyalah pasif pada hal-hal yang menyangkut permulaan, penyelesaian dan materi sengketa—yang mana juga berpengaruh pada apa yang dimohon untuk diputuskan/ditetapkan. Artinya, sifat pasif hakim dalam hukum acara perdata tidak mencakup keseluruhan proses persidangan. Di dalam proses beracara, bahkan sebenarnya hakim dituntut untuk menjadi aktif. Hakimlah yang harus memimpin persidangan¹⁹, khususnya untuk: membantu pengajuan gugatan²⁰, mengusahakan perdamaian bagi para pihak²¹, memberikan nasihat kepada para pihak²², mengarahkan dan mengatur proses jawab-jinawab²³, memimpin pemeriksaan saksi²⁴, menemukan hukum²⁵ dan memimpin eksekusi²⁶.

Pemeriksaan secara *ex officio* mengenai kewenangannya dalam memeriksa perkara permohonan merupakan manifestasi dari keaktifan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Bahkan, seandainya pengadilan negeri tidak berwenang namun tetap mengeluarkan penetapan, justru yang terjadi adalah pelanggaran terhadap beberapa kewajiban hukum.

Pertama, pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (1) *Herzeine Inlands Reglement* (“HIR”) yang menyatakan: “*Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.*”²⁷ Berdasarkan

¹⁹ Lihat, Soepomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. Ke-15, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 19. Lihat juga, Tata Wijayanta et al., ‘Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formil’ 2010 22-3, *Mimbar Hukum*, h. 577. Lihat juga, Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 12.

²⁰ *Herzeine Inlands Reglement*, S. 1941-44, Pasal 119.

²¹ *Ibid.*, Pasal 130 ayat (1).

²² *Ibid.*, Pasal 132.

²³ Tata Wijayanta et al., *Op.Cit.*, h. 576.

²⁴ *Herzeine Inlands Reglement*, *Op.Cit.*, Pasal 150.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 178 ayat (1).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 195.

²⁷ *Herzeine Inlands Reglement*, *Op.Cit.*, Pasal 178 ayat (1).

ketentuan ini, ada beberapa hal yang dapat diinferensikan: (i) hakim dianggap mengetahui hukum; (ii) ketiadaan/kesalahan/kekurangan dasar hukum bukan halangan dalam pengajuan gugatan selama ada kejelasan mengenai kejadian materilnya; dan (iii) hakim harus melengkapi dan/atau membenarkan dasar hukum yang diajukan.²⁸ Berdasarkan uraian ini, terang bahwa pemeriksaan mengenai apakah hakim berwenang atau tidak—yang merupakan pemeriksaan terhadap dasar hukum—adalah hal yang demi hukum harus dilakukan oleh hakim pada saat ia hendak menjatuhkan putusan (termasuk penetapan). Kealpaan melakukan hal ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (1) HIR.

Kedua, pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) UU KK yang mewajibkan adanya dasar hukum yang tepat dalam membuat penetapan.²⁹ Kewajiban hukum ini serupa dengan kewajiban yang termuat dalam Pasal 178 ayat (1) HIR: bahwa hakim harus memutus dengan menggunakan dasar hukum yang benar, terlepas dari apa yang disampaikan kepadanya. Dalam hal hakim memutus permohonan tanpa dilandasi kewenangan karena ia tidak memeriksa dasar hukum permohonan tersebut, jelas bahwa hakim sudah membuat penetapan dengan dasar hukum yang tidak tepat—bahkan tidak ada. Dengan demikian, terjadilah pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) UU KK.

Pertanyaan selanjutnya sehubungan dengan kewajiban *ex officio* hakim dalam memeriksa dasar kewenangannya sendiri tentu saja: seandainya hakim menyatakan sebuah permohonan tidak dapat diterima karena pengadilan tidak memiliki dasar kewenangan meski pemohon tidak pernah menguraikan perihal kewenangan ini di dalam permohonannya, bukankah penetapan tersebut merupakan penetapan yang *ultra petita*?

Jawaban secara positif terhadap pertanyaan ini dapat dipahami dengan memperhatikan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan: “*Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.*”³⁰ Merujuk pada ketentuan ini, selang pandang dapat dikatakan bahwa penetapan yang mempersoalkan perihal kewenangan di saat pemohon tidak pernah mendalilkannya tentu telah berada di luar dari apa yang dimohonkan. Atau sederhananya, terjadi pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (3) HIR. Benarkah demikian?

Ada 2 perspektif untuk menyanggah pertanyaan ini. *Pertama*, persoalan hukum adalah persoalan hakim dan bukan pihak.³¹ Hukum dalam konteks ini tentu mencakup pula hukum

²⁸ Lihat, R. Tresna, 2001, *Komentar HIR*, Cet. Ke-17, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 158. Lihat juga, R. Soesilo, 1995, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, h. 131.

²⁹ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 53 ayat (2).

³⁰ *Herzeine Inlands Reglement*, *Op.Cit.*, Pasal 178 ayat (3).

³¹ Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 85. Lihat juga, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cet. Ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 33.

yang menjadi dasar kewenangannya untuk mengadili suatu permohonan. Dengan logika ini, penilaian terhadap kewenangan (baca: hukum) adalah penilaian yang berada di luar materi permohonan, dan karenanya penilaian ini—meski tidak didalilkan sebelumnya—bukanlah suatu bentuk *ultra petita*. Logika ini pada dasarnya sejalan dengan konsep keaktifan hakim dalam menentukan hukum yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 53 ayat (2) UU KK.

Kedua, dengan memperhatikan sifat sengketa, permohonan tergolong sebagai *jurisdictio voluntaria* yang memiliki corak administratif yang kental. Dengan kondisi yang demikian, hakim tidak terikat pada apa yang diminta oleh pemohon.³² Hakim bisa melebihi apa yang dimohonkan karena dalam *jurisdictio voluntaria*, hakim bertindak sebagai pejabat administrasi negara yang mengatur hal tertentu.³³ Artinya, pada dasarnya permohonan tidak mengenal konsep *ultra petita* dan karenanya penilaian yang melebihi apa yang disampaikan oleh pemohon dalam perkara permohonan, termasuk penilaian mengenai dasar kewenangan hakim, adalah hal yang pada dasarnya diperbolehkan.

Keseluruhan uraian di atas menunjukkan bahwa penilaian secara *ex officio* terhadap dasar kewenangan pada perkara permohonan tidaklah melanggar azas hakim bersifat pasif baik dalam proses beracara maupun dalam penetapan yang dikeluarkan. Pada proses acara, kepasifan hakim tidak termasuk dalam penentuan hukum yang benar, termasuk hukum yang menjadi dasar kewenangan. Sedangkan dalam penetapan yang kemudian dikeluarkan, munculnya penilaian mengenai dasar kewenangan hakim dalam memeriksa perkara permohonan yang ada tidak bisa dikatakan sebagai *ultra petita*.

Penilaian Kompetensi Sendiri dan Azas *Ius Curia Novit*

Ius curia novit adalah adagium dan juga prinsip dalam hukum acara perdata yang berarti hakim dianggap mengetahui hukum.³⁴ Konsekuensi dari pengetahuan hakim terhadap hukum, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU KK adalah, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.³⁵ Dengan menghubungkan ketentuan ini dengan norma dalam Pasal 5 ayat (1) UU KK yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”³⁶, dan kemudian mengaitkannya dengan pengajuan permohonan yang tidak berdasar hukum, maka hasilnya adalah: hakim seyogianya tetap mengadili permohonan yang

³² Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-9, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 13.

³³ *Ibid.*, h. 12-13.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 821.

³⁵ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 10 ayat (1).

³⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

diajukan meski tidak ada dasar kewenangannya karena hakim seyogianya membuat sendiri landasan kewenangan tersebut dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Benarkah demikian?

Tentu tidak. Ada 3 alasan untuk membantah pertanyaan ini. *Pertama*, kewenangan pengadilan adalah bagian dari hukum acara yang merupakan *dwingenrecht*. Hukum acara perdata merupakan hukum yang digunakan untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata materiil dengan menggunakan perantara kekuasaan negara.³⁷ Hukum acara perdata tidak memuat hak dan kewajiban seperti hukum perdata materiil.³⁸ Oleh karena fungsi hukum acara adalah untuk mempertahankan hak, maka hukum acara bersifat memaksa, kaku dan tidak dapat disimpangi.³⁹ Ketika hukum acara—dalam hal ini adalah Buku II MA—telah menentukan bahwa harus ada dasar hukum bagi pengadilan sebelum bisa memutus sebuah permohonan, maka hal ini berlaku mutlak. Pemeriksaan terhadap permohonan yang tidak dilandasi dasar kewenangan merupakan pelanggaran terhadap hukum acara. Dalam kondisi demikian, keseluruhan sistem perlindungan hak justru menjadi taruhannya.

Kedua, penemuan hukum terhadap kewenangan pengadilan melanggar azas *nemo iudex in causa sua* (tiada seorang pun boleh mengadili perkaranya sendiri). Jika hakim mengadili permohonan yang diajukan kepadanya semata-mata karena ia tidak boleh menolaknya, yang dilakukan oleh hakim tersebut pada dasarnya adalah menilai dan menambahkan kewenangannya sendiri. Artinya, penerapan azas *ius curia novit* secara buta malah akan menabrak azas hukum acara lainnya, yaitu *nemo iudex in causa sua* yang pada dasarnya didesain untuk menjaga imparialitas hakim dalam memutus perkara.

Ketiga, penolakan untuk memeriksa perkara atas dasar tidak ada dasar kewenangan adalah penolakan yang dibenarkan sebab dasar dari penolakan ini adalah undang-undang⁴⁰, khususnya Pasal 132 Rv sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain, penolakan yang dilakukan atas dasar ketidakberwenangan merupakan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (1) UU KK.

Uraian di atas telah menggambarkan bahwa azas *ius curia novit* tidaklah relevan untuk dipaksakan terhadap penolakan hakim untuk memeriksa suatu permohonan yang tidak memiliki landasan kewenangannya, sebab pemaksaan untuk menerapkan azas *ius curia novit* justru akan menempatkan keseluruhan sistem perlindungan hak dalam hukum acara

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 5.

³⁸ *Ibid.*, h. 2.

³⁹ Machri Hendra, MKRI, Putusan No. 004/PUU-I/2003, h. 28.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 35.

dan imparsialitas peradilan dalam bahaya. Bahkan, penolakan untuk memeriksa atas dasar kewenangan adalah penolakan yang dibenarkan undang-undang.

Potensi Permasalahan Praktis Jika Penilaian Kompetensi Sendiri Diterapkan

Permasalahan yang niscaya akan timbul jika hakim diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap kompetensinya secara *ex officio* adalah bertambahnya beban hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan di saat beban kerja hakim sudah cukup tinggi. Dengan dilaksanakannya kewajiban ini, maka hakim jadi harus menyiapkan waktu dan tenaga tambahan guna memastikan bahwa setiap permohonan yang diajukan kepadanya memiliki dasar hukum. Padahal, saat ini rata-rata beban kerja hakim di pengadilan negeri (berdasarkan data pada tahun 2008 dan 2009) adalah 217 perkara per tahun,⁴¹ dengan rata-rata kinerja penyelesaian perkara sebesar 163,72 perkara per tahun⁴². Penambahan tugas bagi hakim berpotensi menurunkan kinerja hakim sehingga tingkat penyelesaian perkara akan semakin berkurang sementara penumpukan perkara akan semakin bertambah.

Potensi Permasalahan Praktis Jika Penilaian Kompetensi Sendiri Tidak Diterapkan

Ada 2 permasalahan praktis yang akan dihadapi jika hakim perdata tidak melakukan penilaian terhadap kompetensinya sendiri sebelum memeriksa pokok perkara dalam permohonan yang diajukan kepadanya, yaitu: (i) berkembangnya *vexatious litigation*; dan (ii) upaya hukum yang tidak memadai.

Vexatious litigation adalah upaya hukum yang diajukan tanpa dasar fakta maupun hukum yang jelas dengan tujuan untuk mengganggu lawan.⁴³ Dari definisi ini, bisa dikatakan bahwa *vexatious litigation* adalah suatu (atau rangkaian) upaya hukum yang diajukan dengan itikad buruk. Bentuk dari *vexatious litigation* bermacam-macam, dan tentunya juga meliputi pengajuan permohonan yang tidak dilandasi dasar hukum dan sebenarnya memiliki kepentingan pihak ketiga di dalamnya. Contohnya tentu saja pengajuan permohonan Saranggi yang berbuntut pada Penetapan No. 29/Pdt.P/2017/PN Trg.

Permohonan yang diajukan oleh Saranggi adalah permohonan untuk mengubah nama penerima pelepasan hak atas tanah.⁴⁴ Pihak yang melakukan pelepasan hak atas tanah adalah Sutedja untuk kepentingan PT BPEP, sehingga yang tercatat dalam surat pernyataan pelepasan

⁴¹ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, *Data Statistik sebagai Alat Menghitung Beban Kerja, Kinerja, dan Kebutuhan Personil Hakim/Jaksa*, h. 6, <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Kajian-Kebutuhan-Hakim-Berita-Peradilan.pdf>, diakses pada 3 Juli 2018.

⁴² *Ibid.*, h. 9

⁴³ Lihat, USLegal.com, *Vexatious Litigation Law and Legal Definition*, <https://definitions.uslegal.com/v/vexatious-litigation/>, diakses pada 23 Juni 2018. Lihat juga, Legal Dictionary, *Vexatious Litigant*, <https://legaldictionary.net/vexatious-litigant/>, diakses pada 23 Juni 2018. Lihat juga, The Free Dictionary, *Vexatious Litigation*, <https://www.thefreedictionary.com/vexatious+litigation>, diakses pada 23 Juni 2018.

⁴⁴ *H. Veritas Saranggi, Loc.cit.*

hak adalah “Ruddy Sutedja (PT. BPEP)”.⁴⁵ Saranggi kemudian meminta agar penerima pelepasan hak atas tanah diganti menjadi Sutedja untuk kepentingan PT BKPL, sehingga pencatatannya menjadi “Ruddy Sutedja (PT. BKPL)”.⁴⁶ Alasannya adalah, Sutedja adalah direktur dari PT BKPL dan biaya yang digunakan untuk melakukan pelepasan hak ditanggung oleh PT BKPL atas dasar perjanjian antara PT BPEP dan PT BKPL.⁴⁷ Selanjutnya, dengan memperhatikan daftar alat bukti yang disajikan Saranggi, barulah diketahui bahwa Saranggi adalah direktur PT BKPL⁴⁸, meski permohonan diajukan dalam kapasitas pribadinya.⁴⁹

Dari konstruksi di atas, nyata adanya kepentingan pihak-pihak ketiga, yaitu: (i) Sutedja, selaku pihak yang melakukan pelepasan hak atas tanah secara fisik; dan (ii) PT BPEP, selaku penerima pelepasan hak atas tanah secara yuridis. Permasalahannya, kedua pihak ini bahkan tidak didudukkan sebagai termohon oleh Saranggi selaku pemohon sehingga permohonan diperiksa secara *ex parte*. Tentu hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa Saranggi mengajukan permohonan ini secara *ex parte*? Mungkin ia tidak sadar bahwa ada pihak lain yang juga memiliki kepentingan terhadap hal yang ia mohonkan?

Contoh di atas hanya 1 dari banyak kondisi lain, di mana permohonan diajukan guna menghilangkan kesempatan dari pihak lain untuk mengajukan bantahannya terhadap hak yang dimohonkan. Di sini, azas hakim bersifat pasif jelas bisa dijadikan andalan guna menghalangi hakim untuk menarik pihak ketiga yang berkepentingan dalam proses hukum yang berjalan. Permohonan pun secara asal diajukan kendati tidak ada dasar hukumnya. Di sini, para pemohon bisa dengan nyaman berlindung di balik azas *ius curia novit* dan menyatakan bahwa seyogianya hakim tidak boleh menolak perkara.

Uraian di atas telah menggambarkan rentannya status *quo* peradilan di Indonesia. Pengenalan kewajiban bagi hakim perdata untuk secara otonom menilai kompetensinya sendiri ketika permohonan diajukan kepadanya seyogianya bisa meringankan keadaan ini.

Selanjutnya, permasalahan kedua mengenai kurangnya upaya hukum akan muncul jika: (i) permohonan diperiksa secara *ex parte*—kendati ada kepentingan pihak ketiga di dalamnya; (ii) pihak yang berkepentingan tidak mengetahui proses pemeriksaan permohonan; atau (iii) kendati pihak yang berkepentingan mengetahui proses pemeriksaan, namun keikutsertaannya untuk menjadi pelawan ditolak. Akibatnya, penetapan dikeluarkan tanpa mengikutsertakan pihak ketiga yang berkepentingan. Kondisi pertama dan kedua inilah yang secara nyata terjadi dalam perkara yang akhirnya menghasilkan Penetapan No. 29/Pdt.P/2017/PN Trg, di mana

⁴⁵ *Ibid.*, h. 28.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 29.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 26-27.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 1.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 34.

permohonan diperiksa secara *ex parte* meski ada kepentingan pihak ketiga di dalamnya, dan hasilnya adalah adanya kerugian bagi pihak ketiga.

Secara praktis, ada banyak upaya hukum yang bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan (dirugikan) guna membatalkan penetapan pengadilan negeri: (i) pengajuan gugatan ke pengadilan negeri⁵⁰; (ii) pengajuan perlawanan ke pengadilan negeri⁵¹; (iii) pengajuan permohonan pembatalan ke pengadilan tinggi⁵²; (iv) pengajuan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”)⁵³; (v) pengajuan permohonan kasasi ke MARI⁵⁴; maupun (vi) pengajuan permohonan peninjauan kembali ke MARI⁵⁵. Kendatipun demikian, dari deretan upaya hukum tersebut, yang memiliki dasar dalam perundang-undangan hanyalah: (i) perlawanan ke pengadilan negeri⁵⁶; (ii) permohonan ke pengadilan tinggi⁵⁷; (iii) permohonan ke MARI⁵⁸; dan (iv) kasasi ke MARI. Sedangkan upaya hukum yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang untuk membatalkan penetapan adalah kasasi.⁵⁹

Tiap upaya hukum sebagaimana tersebut di atas memiliki permasalahannya masing-masing. *Pertama*, masalah untuk pengajuan gugatan adalah mengenai: (i) apa yang digugat; dan (ii) siapa yang digugat. Jika yang dipermasalahkan adalah penetapan, seyogianya yang ditarik menjadi tergugat adalah hakim pemeriksa dan yang digugat adalah penetapannya itu sendiri. Namun, tentu saja tidak mungkin demikian konstruksi yang akan dibangun mengingat adanya perlindungan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.⁶⁰ Akibatnya, gugatan kemudian akan dilayangkan terhadap pemohon, dan yang akan dipermasalahkan adalah “hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan.”⁶¹ Permasalahan dari konstruksi ini adalah: (i) isu yang akan dijawab oleh pengadilan adalah hubungan hukum antara penggugat dan pemohon; (ii) karenanya,

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 44-45.

⁵¹ *PT. Bintang Prima Energy Pratama melawan H. Veritas Saranggi*, PN Tenggarong, Putusan No. 43/Pdt.Bth/2017/PN Trg, 6 Maret 2018.

⁵² HukumOnline.com, *Upaya Hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri jadi Perdebatan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12438/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-negeri-jadi-perdebatan>, diakses pada 22 Juni 2018.

⁵³ Nurul Elmiyah dan Supardjo Sujadi, ‘Upaya-Upaya Hukum terhadap Penetapan’ 2005 35-3, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, h. 340-344.

⁵⁴ *Jenny Rachman melawan Budi Prakoso*, MARI, Putusan No. 3302 K/Pdt/1996, 28 Mei 1998.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 45.

⁵⁶ *Reglement op de Rechtvordering* (S. 1847-52 jo. 1849-63) Pasal 378.

⁵⁷ Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, UU No. 49 Tahun 2009 (LN No. 158 Tahun 2009, TLN No. 5077) Pasal 53 ayat (3).

⁵⁸ Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU No. 3 Tahun 2009 (LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958) Pasal 32 ayat (1).

⁵⁹ Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004 (LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359) Pasal 30 ayat (1).

⁶⁰ Mahkamah Agung Rpeublik Indonesia, *Surat Edaran tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim*, SEMA No. 9 Tahun 1976 (16 Desember 1976).

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*

pengadilan negeri tidak seharusnya membatalkan penetapan yang ada; (iii) hasilnya, akan ada 2 produk hukum yang bisa saling bertentangan.

Kedua, kendati ada dasar dalam perundang-undangan untuk mengajukan perlawanan terhadap penetapan, yaitu Pasal 378 Rv⁶², mengingat terminologi yang digunakan dalam Pasal ini adalah “putusan”, maka sangat dimungkinkan untuk menyatakan bahwa perlawanan hanya bisa diajukan terhadap “putusan” dan bukan penetapan. Di sisi lain, secara praktis hakim pun melihat bahwa perlawanan pihak ketiga semata-mata terkait dengan adanya sita—baik jaminan maupun eksekusi.⁶³ Akibatnya, perlawanan yang diajukan terhadap penetapan yang tidak terkait sita akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.⁶⁴

Ketiga, masalah dari permohonan pembatalan ke pengadilan tinggi yang diajukan berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum⁶⁵ adalah: (i) ketentuan ini tidak secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pengadilan tinggi untuk membatalkan penetapan; dan (ii) konteks pengawasan dalam Pasal ini seyogianya dimaknai sebagai pengawasan non-teknis yudisial dalam konteks struktural sebab tindakan yang bisa diambil hanyalah sebatas petunjuk, teguran dan peringatan.⁶⁶ Pembatalan atau pengujian terhadap produk hukum dari pengadilan negeri tidak termasuk dalam bagian tindakan yang bisa dilakukan dalam rangka pengawasan.

Keempat, permohonan pembatalan penetapan kepada MARI yang didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung⁶⁷ juga memiliki masalah yang sama dengan permasalahan pada permohonan pembatalan ke pengadilan tinggi, yaitu kewenangan pembatalan tidak eksplisit dan konteks pengawasan adalah pengawasan non-teknis yudisial⁶⁸.

⁶² Pasal 378 *Reglement op de Rechtvordering*: “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”

⁶³ Lihat, Sarwohadi, *Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga/Derden Verzet*, Pengadilan Tinggi Agama Mataram, http://arsip.pta-mataram.go.id/sys-content/uploads/file/eDoc/Artikel/Artikel_Sarwohadi_2017-04-11_Penyelesaian_Derden_Verzet.pdf, h. 1, diakses pada 23 Juni 2018. Lihat juga, M. Yamin Awie, *Derden Verzet*, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, <https://www.pta-semarang.go.id/images/stories/artikel/derden-verzet-hm-yamin-awie.pdf>, h. 2, diakses pada 23 Juni 2018.

⁶⁴ *PT. Bintang Prima Energy Pratama melawan H. Veritas Saranggi*, *Op.cit.*, h. 84.

⁶⁵ Pasal 53 ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum: “Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.”

⁶⁶ Indonesia (d), *Op.cit.*, Pasal 53 ayat (4).

⁶⁷ Pasal 32 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.”

⁶⁸ Indonesia (e), *Op.cit.*, Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5).

Kelima, permohonan kasasi untuk membatalkan penetapan bisa diajukan atas beberapa alasan, yaitu: (i) pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (ii) pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (iii) pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁶⁹ Meski kasasi memang secara hukum bisa digunakan untuk membatalkan kasasi, namun secara hukum pula yang bisa mengajukan permohonan kasasi hanyalah para pihak yang bersengketa saja.⁷⁰ Dengan kata lain, dalam permohonan yang diperiksa secara *ex parte*, maka yang bisa mengajukan permohonan kasasi hanyalah pemohon saja.

Keenam, permasalahan pengajuan peninjauan kembali terhadap penetapan adalah: (i) tidak ada dasar perundang-undangan yang mengaturnya; dan (ii) hanya bisa diajukan oleh pihak yang berperkara.⁷¹

Uraian di atas menunjukkan 2 hal. *Pertama*, banyaknya jenis upaya hukum guna membatalkan penetapan dalam ranah praktis menunjukkan banyaknya akrobat hukum yang dilakukan oleh praktisi hukum di Indonesia. Di satu sisi akrobat ini bisa saja dikatakan terjadi karena belum komprehensifnya pengaturan mengenai hukum acara perdata di Indonesia, namun di sisi lain juga bisa juga dikatakan sebagai bentuk “tidak mau kalahnya” (untuk tidak mengatakan itikad buruk) pencari keadilan di Indonesia. Dengan membiarkan status *quo*, adalah sebuah keniscayaan jika jenis upaya hukum ini akan semakin bertambah nantinya. *Kedua*, tidak ada upaya hukum yang secara definitif bisa digunakan oleh pihak ketiga untuk menguji dan membatalkan penetapan yang merugikannya. Contoh paling nyata terjadi pada upaya hukum terhadap Penetapan No. 29/Pdt.P/2017/PN Trg yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Perlawanan yang diajukan kandas karena dianggap tidak memenuhi syarat formil.⁷² Hal ini seyogianya tidak terjadi seandainya hakim yang memeriksa permohonan terlebih dahulu memastikan apakah dirinya berwenang atau tidak terlebih dahulu—dan seyogianya juga menilai apakah ada kepentingan pihak ketiga atau tidak.

Keseluruhan uraian pada bagian ini telah membuktikan adanya kebutuhan secara praktis untuk memunculkan kewajiban bagi hakim untuk memeriksa kompetensinya secara otonom terhadap permohonan yang diajukan kepadanya. Kebutuhan ini khususnya ada guna mencegah merebaknya praktik *vexatious litigation* di Indonesia—baik yang memanfaatkan celah dalam mengajukan permohonan secara “asal” dan yang menggunakan segala daya upaya guna

⁶⁹ Indonesia (f), *Loc.cit.*

⁷⁰ Indonesia (g), *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985 (LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316) Pasal 44 ayat (1) huruf a.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (1).

⁷² *PT. Bintang Prima Energy Pratama melawan H. Veritas Saranggi*, *Op.cit.*, h. 85.

membatalkan penetapan tersebut; serta guna menghindari munculnya ketidakadilan bagi pihak ketiga yang hak dan kesempatannya lantas hilang karena adanya upaya hukum sepihak ini.

PENUTUP

Praktik acara yang terangkum dalam Penetapan No. 29/Pdt.P/2017/PN Trg tak hanya telah mengabaikan ketentuan hukum acara dalam Buku II MA, namun juga mengabaikan Pasal 132 Rv. Hasilnya, muncul sebuah penetapan yang bermasalah secara hukum dan berpotensi mengobarkan masalah dalam tataran praktis.

Pemeriksaan terhadap dasar kewenangan pengadilan dalam hal diajukan permohonan kendati tidak ada dalil dari pemohon tidaklah melanggar azas hakim bersifat pasif karena kepasifan hakim dalam hukum acara perdata terbatas pada dimulai dan berakhirnya perkara dan materi perkara, sedangkan perihal hukum, yang mana kewenangan termasuk di dalamnya, adalah bagian dari kekuasaan hakim. Dalam konteks hukum, hakim bahkan dituntut untuk bersikap aktif. Jika hakim tidak bersifat aktif dalam menentukan mana hukum yang benar, yang terjadi justru adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 53 ayat (2) UU KK.

Di sisi lain, penetapan yang mempertimbangkan dasar kewenangan hakim dalam memeriksa permohonan bukanlah penetapan yang *ultra petita* sebab konsep *ultra petita* terkait erat dengan materi perkara dan bukan hukum. Terlebih, konsep *ultra petita* tidaklah bisa digunakan dalam permohonan karena sifatnya administratif.

Penetapan macam ini pun bukan merupakan pengingkaran terhadap azas *ius curia novit* karena ketiadaan kewenangan bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi dengan alasan hakim bisa melakukan penemuan hukum. Jika hakim memaksakan diri untuk memeriksa permohonan meski tanpa ada dasar kewenangan, yang terjadi malah pelanggaran terhadap hukum acara perdata yang berarti keseluruhan sistem perlindungan hak perdata menjadi terancam; yang terjadi adalah pelanggaran terhadap azas *nemo iudex in causa sua* yang merupakan perwujudan dari imparsialitas hakim. Di sisi lain, penolakan untuk memeriksa atas dasar kewenangan adalah penolakan yang dibenarkan undang-undang.

Secara praktis, tak ayal bahwa seandainya hakim harus memeriksa dasar kewenangannya tiap kali ada permohonan yang diajukan kepadanya, maka beban hakim akan semakin bertambah. Namun, di sisi lain, jika hal ini tidak dilakukan, justru akan muncul semakin banyak permasalahan. Permasalahan pertama tentu akan merebaknya *vexatious litigation* yang memanfaatkan celah dari adagium *ius curia novit* guna melakukan upaya hukum yang

merugikan pihak lain. Permasalahan berikutnya adalah ketiadaan upaya hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat adanya penetapan pengadilan yang bersumber dari *vexatious litigation* ini.

Dengan mempertimbangkan aspek azas dan praktis dari perdebatan mengenai kewajiban bagi hakim dalam memeriksa kewenangannya secara *ex officio* terhadap permohonan yang diajukan kepadanya, bisa disimpulkan bahwa: (i) tidak ada masalah pada tataran azas bagi hakim perdata untuk menerapkan kewajiban memeriksa kompetensinya secara *ex officio* terhadap permohonan yang diajukan kepadanya; dan (ii) lebih banyaknya masalah secara praktis yang akan terjadi ketika kewajiban ini tidak dilakukan, maka kewajiban yang diambil dari Buku II MA dan Pasal 132 Rv ini seyogianya dijadikan salah satu pegangan utama bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-16. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2007. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dan Perdata Khusus Buku II*, Edisi 2007. N.p., Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-7. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. 2013. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cet. Ke-2. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-9. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Cet. Ke-2. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soepomo. 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. Ke-15. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Politeia, Bogor.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-11. CV. Mandar Maju, Bandung.

Tresna, R. 2001. *Komentar HIR*, Cet. Ke-17. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Wijayanta, Tata, et al. 'Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formil' 2010 22-3. *Mimbar Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*. UU No. 14 Tahun 1985. LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5 Tahun 2004. LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

_____. *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006. LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU No. 3 Tahun 2009. LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.

_____. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. UU No. 49 Tahun 2009. LN No. 158 Tahun 2009, TLN No. 5077.

Reglement op de Rechtvordering. S. 1847-52 jo. 1849-63.

Herzeine Inlands Reglement. S. 1941-44.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim*. SEMA No. 9 Tahun 1976. 16 Desember 1976.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Keputusan tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. KepKMA No. KMA/032/SK/IV/2006. 4 April 2006.

Jurnal

Elmiyah, Nurul dan Supardjo Sujadi. 'Upaya-Upaya Hukum terhadap Penetapan' 2005 35-3. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Putusan dan Penetapan

Machri Hendra. MKRI. Putusan No. 004/PUU-I/2003.

Jenny Rachman melawan Budi Prakoso. MARI. Putusan No. 3302 K/Pdt/1996, 28 Mei 1998.

PT. Bintang Prima Energy Pratama melawan H. Veritas Saranggi. PN Tenggara. Putusan No. 43/Pdt.Bth/2017/PN Trg, 6 Maret 2018.

H. Veritas Saranggi. PN Tenggara. Penetapan No. 29/Pdt.P/2017/PN Trg, 28 Juli 2017.

Sumber Lain:

Awie, M. Yamin. *Derden Verzet. Pengadilan Tinggi Agama Semarang*. <https://www.pta-semarang.go.id/images/stories/artikel/derden-verzet-hm-yamin-awie.pdf>, diakses pada 23 Juni 2018.

HukumOnline.com. *Upaya Hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri jadi Perdebatan*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12438/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-negeri-jadi-perdebatan>, diakses pada 22 Juni 2018.

Legal Dictionary. *Vexatious Litigant*. <https://legaldictionary.net/vexatious-litigant/>, diakses pada 23 Juni 2018.

Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. *Data Statistik sebagai Alat Menghitung Beban Kerja, Kinerja, dan Kebutuhan Personil Hakim/Jaksa*. <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Kajian-Kebutuhan-Hakim-Berita-Peradilan.pdf>, diakses pada 3 Juli 2018.

Rijanto, R. Benny. *Modul 1: Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf>, h. 26-30, diakses pada 2 Juli 2018.

Sarwohadi. *Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga/Derden Verzet. Pengadilan Tinggi Agama Mataram*, http://arsip.pta-mataram.go.id/sys-content/uploads/file/eDoc/Artikel/Artikel_Sarwohadi_2017-04-11_Penyelesaian_Derden_Verzet.pdf, diakses pada 23 Juni 2018.

TheFree Dictionary. *Vexatious Litigation*. <https://www.thefreedictionary.com/vexatious+litigation>, diakses pada 23 Juni 2018.

USLegal.com. *Vexatious Litigation Law and Legal Definition*. <https://definitions.uslegal.com/v/vexatious-litigation/>, diakses pada 23 Juni 2018.